

SINERGI



**Kementerian PUPR Dukung
Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) di Kawasan Industri**





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

SIGAP MEMBANGUN NEGERI



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@pu.go.id Telp. +6221-2751-5802

Salam Sinergi

Pembaca yang terhormat

Pembaca yang terhormat, pada Edisi 48 September - Oktober 2020 pada rubrik Topik Utama dibahas mengenai Dukungan Kementerian PUPR terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kawasan Industri. Rubrik tersebut membahas seputar dukungan infrastruktur sektor PUPR pada kawasan tersebut.

Selain itu juga dihadirkan wawancara dengan Dr.Ir. Wahyu Utomo, MS, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Wawancara membahas beberapa hal diantaranya mengenai gambaran mengenai kondisi perekonomian akibat Covid-19 dan upaya melakukan PEN terutama di Kawasan Industri.

Sedangkan Warta BPIW membahas dukungan terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam rubrik ini diulas beberapa hal seperti perencanaan dan pemrograman Kementerian PUPR dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus.

Rubrik-rubrik reguler tetap mewarnai buletin edisi seperti Kilas Peristiwa, Plesiran, Bidik Lensa, Info Pengembangan wilayah, Review, dan Sorot. Selain itu tetap dihadirkan Surat Pembaca yang berisi saran maupun kritikan membangun dari pembaca Buletin Sinergi.

Kami berharap Buletin Sinergi edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca yang budiman serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur sektor PUPR.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi

SINERGI

BULETIN BPIW



20

Wawancara:
Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS
Pengembangan Kawasan Industri Untuk
Menyerap Tenaga Kerja

Perspektif

Indra Maulana, ST, MT

Pengembangan Kawasan Industri dan Harapan
Pembangkit Ekonomi Nasional

10

Warta BPIW:

Bangun Infrastruktur Pendukung KEK dan KI,
Upaya Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

28

Review:

Sinergi Program Infrastruktur
Pusat dan Daerah Berbasis Spasial

32

Serba-serbi:

Pengerjaan Proyek Berlanjut,
Pekerja Konstruksi pun Senang

38



42

Sosok:

Iman Argiono S.KOM, MT.
Pengalaman Bekerja di BPIW Menjadi
"Guru Terbaik" Dalam Meniti Karir di Instansi Lain

Tim Penyusun

Pengarah:

Hadi Sucahyono

Penanggung Jawab:

Iwan Nurwanto

Penasihat

Firman H. Napitupulu

Tris Raditian

Kuswardono

Manggas Rudy Siahaan

Pemimpin Redaksi

Hari Suharto Diyaksa

Redaktur Pelaksana

Tiara Titi Kartika

Staf Editor :

Alis Listalatu

Hendra Djamal

Mutri Batul Aini

Tim Pembuat Artikel:

Daris Anugrah

Indira Dwi Kusumatuti

Tim Kontributor Pemberitaan

Sekretariat:

Untung Priyono

Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (BPIW)

Kementerian PUPR

Edisi 48 | September - Oktober 2020

daftar isi



4

Topik Utama: **Kementerian PUPR Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kawasan Industri**

Design Grafis :
Heri Hito
Infografis, layout :
Ajeng Ayuning Pertiwi
Cover line art:
Cut Myra Sukmawati

Alamat Redaksi:
Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Email: humasbpiw@gmail.com,
humasbpiw@pu.go.id
Website: bpiw.pu.go.id
No. Telp. +6221-2751-5802

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@pu.go.id

Kementerian PUPR Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kawasan Industri

Pandemi Covid- 19 memberikan dampak pada sektor perekonomian, salah satunya adalah peningkatan jumlah pengangguran. Pengembangan Kawasan Industri (KI) menjadi salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah untuk mengatasi angka pengangguran. Kementerian PUPR pun punya sejumlah program untuk mendukung pengembangan KI tersebut.



Program PEN merupakan rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Pemerintah juga menjalankan PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi. Program PEN tertuang di PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Program tersebut diharapkan dapat mengatasi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan, terjadi kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 2,67 juta orang selama pandemi. Data kementerian itu juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara yang diakibatkan menurunnya angka kunjungan wisatawan selama pandemi.

Salah satu yang dilakukan Pemerintah terkait program PEN ini adalah percepatan pengembangan KI. Potensi dampak ekonomi jangka pendek dari Konstruksi KI adalah *multiplier effect* dari konstruksi infrastruktur di dalam dan di luar KI.

Berdasarkan kajian *Deloitte Consulting* estimasi penyerapan investasi dari pembangunan KI Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 sebesar Rp 52,938 miliar dengan estimasi serapan tenaga kerja sebesar 31.513 orang per tahun. Selain itu estimasi penyerapan investasi infrastruktur PSN pendukung KI seperti jalan akses, pelabuhan, dan kereta api di 2020 sebesar Rp 31.548 miliar, dengan estimasi serapan tenaga kerja sebesar 24.322 orang per tahun.

Pengembangan KI untuk penyerapan tenaga kerja didasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mana jumlahnya mencapai 27 KI. Di



Pulau Sumatera ada 14 KI yakni KI Ladang , Kuala Tanjung, Sei Mangke, Tenayan, Tanjung Buton, Kemingking, Tanjung Enim, Way Pisang, Katibung, Tanggamus, Sadai, Bintang *Aviation*, Galang Batang, dan Pesawaran.

Sedangkan di Pulau Jawa, Madura, dan NTB ada tiga KI yakni Brebes, Bangkalan, dan Sumbawa Barat. Di Pulau Kalimantan terdapat enam KI yakni Tanah Kuning, Batanjung, Batulicin, Jorong, Surya Borneo, dan Ketapang. Tidak hanya itu, KI juga terdapat di Pulau Sulawesi yakni KI di Palu dan Takalar. Di kawasan Maluku dan Papua terdapat dua KI yakni Teluk Bintuni dan Weda Bay.

Dukungan Program Pembangunan Infrastruktur Sektor PUPR Untuk Pengembangan KI

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono beberapa waktu lalu menyatakan, upaya mengatasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, dilakukan dengan dukungan infrastruktur PUPR pada kawasan tersebut dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN 2020-2024

5 Prioritas sasaran pembangunan kewilayahan :

1 Pengembangan kawasan strategis

Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

2 Pengembangan sektor unggulan

Komoditas Unggulan: Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Karet, Tebu, Lada Pala Cengkeh, Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap

3 Pengembangan kawasan perkotaan

Wilayah Metropolitan, Ibu Kota Negara, Kota Besar, Sedang, Kecil (PKN, PKW), Kota Baru

4 Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Daerah Tertinggal, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Lokasi Prioritas Perbatasan Negara, Kawasan Transmigrasi

5 Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah

Sumber: BPIW

Pembangunan infrastruktur sektor PUPR untuk mendukung KI dilakukan secara terpadu dengan melibatkan empat unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR yakni Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Pembangunan infrastruktur sektor PUPR untuk mendukung KI dilakukan secara terpadu dengan melibatkan empat unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR yakni Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Selain RPJMN, pembangunan infrastruktur menurut Hadi juga mengacu pada direktif Presiden. Salah satunya yang sedang dipercepat pengembangannya adalah KI Batang di Jawa Tengah.

Rencana Pengembangan sektor unggulan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang adalah makanan dan minuman, tekstil, elektronik, otomotif, dan kimia. Sektor kimia dan otomotif memiliki proporsi pengembangan terbesar.

Ultimate Goals atau tujuan utama pengembangan KIT Batang yakni mendapat dukungan infrastruktur pintu tol Batang, akses jalan masuk kawasan dari jalan nasional sepanjang 17 km, dan Penyediaan Air Baku Jangka Pendek dari Kali Urang sebesar 285 lt/dt.

Ultimate Goals lainnya adalah Pembangunan Waduk Kedunglanggar dengan potensi volume tampungan mencapai 24 juta m³, dan Pembangunan Pengaman Pantai KIT Batang sepanjang 500 meter. Selain itu ada rencana pembangunan kebutuhan akan Rumah Susun Pekerja sebanyak 260 TB. *Ultimate Goals* infrastruktur sektor lain yakni sektor Perhubungan yakni pembangunan *Dry Port* untuk logistik ekspor, membangun stasiun kereta api barang untuk mengangkut kontainer menuju Pelabuhan Tanjung Mas.

Beberapa program prioritas Kementerian PUPR di KI Batang yang direncanakan masuk tahap konstruksi Desember tahun ini adalah infrastruktur jalan sekunder sepanjang 11,4 km dan Jalan Utama sepanjang 5,2 km. Sedangkan yang masuk tahap konstruksi tahun depan adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sampah, air baku, pengelolaan air bersih, dan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Pengembangan infrastruktur terpadu direncanakan juga di KI Tanjung Enim yang berada di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pengelolanya adalah PT. Bukit Asam Tbk dengan kegiatan utama, batubara. Total luas lahan KI itu yakni sebesar 585 ha. Lahan seluas 357,95 ha lahan telah dikuasai oleh PT. Bukit Asam Tbk.

Tidak hanya itu, KI Kuala Tanjung di Sumatera Utara direncanakan mendapat dukungan infrastruktur PUPR. KI Kuala Tanjung berada di Desa Kwala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, dan Kabupaten Batu Bara. KI yang memiliki luas lahan mencapai 3.400 ha ini sedang dalam proses *update* kajian kelayakan oleh konsultan. Kemudian, telah dilakukan penetapan lokasi tahap II (total 2.750 ha), sudah dilakukan studi kelayakan dan sedang proses pembaharuan izin lingkungan.

KI Kuala Tanjung yang berada di Sumatera Utara menjadi salah satu sasaran yang strategis yang didukung pengembangannya oleh Kementerian PUPR. Kawasan ini memiliki terminal *multipurposes* atau multiguna, *hub port*, dan *integrated urban area*.

KI Bagian dari Lima Prioritas Sasaran Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2020-2024 dan Strategi Pembangunan Infrastruktur sektor PUPR 2020-2024

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat Sasaran Pembangunan Kewilayahan yang di dalamnya terdapat Lima Prioritas Sasaran Pembangunan Kewilayahan. Pertama, Pengembangan Kawasan Strategis. KI menjadi salah satu pengembangan kawasan strategis tersebut selain KEK dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

Prioritas yang kedua adalah Pengembangan Sektor Unggulan. Komoditas Unggulan yakni Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Karet, Tebu, Lada Pala Cengkeh, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.

Prioritas ketiga adalah Pengembangan Kawasan Perkotaan yang terdiri dari Wilayah Metropolitan, Ibu Kota Negara, Kota Besar, Sedang, Kecil (Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)), dan Kota Baru.

Prioritas Sasaran Pembangunan Kewilayahan yang keempat adalah Pusat Kegiatan Strategis Nasional

KI Kuala Tanjung di Sumatera Utara direncanakan mendapat dukungan infrastruktur PUPR. KI Kuala Tanjung berada di Desa Kwala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, dan Kabupaten Batu Bara.

PROFIL KAWASAN INDUSTRI Tanjung Enim



Lokasi: Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan

	Izin Proses Izin Lokasi dan AMDAL
	Pengelola PT. Bukit Asam Tbk.
	Lahan Luas Total Lahan Kawasan Industri: 585 ha Progress Kepemilikan Lahan Sejumlah 357,95 ha lahan telah dikuasai oleh PT. Bukit Asam Tbk.
	Kegiatan Utama Industri Batubara





Sumber: BPIW


Dengan dijadikannya KI sebagai salah satu target PEN oleh pemerintah, Kementerian PUPR melalui BPIW mendukung pengembangan KI sebagai bagian dari kawasan strategis secara terpadu




Program Prioritas Kementerian PUPR
DI KAWASAN INDUSTRI BATANG

 Infrastruktur jalan sekunder sepanjang 11,4 km dan Jalan Utama sepanjang 5,2 km
(direncanakan konstruksi Desember 2020)

 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sampah
(Konstruksi 2021)

 Air Baku
(Konstruksi 2021)

 Pengelolaan Air Bersih
(Konstruksi 2021)

 Rumah Susun Sederhana Sewa.
(Konstruksi 2021)



Sumber: PUPR

(PKSN), Daerah Tertinggal, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Lokasi Prioritas Perbatasan Negara, dan Kawasan Transmigrasi. Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Daerah menjadi Prioritas Sasaran Pembangunan Kewilayahan yang kelima.

Selain itu di salah satu Strategi Pembangunan Infrastruktur sektor PUPR 2020-2024 disebutkan bahwa pengembangan wilayah KI, menjadi salah satu kawasan yang didukung oleh Kementerian PUPR. Selain KI, Kementerian PUPR juga mendukung pengembangan wilayah di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN), KEK, Kawasan Bandara/ Pelabuhan, dan kawasan produktif lainnya. Strategi pembangunan infrastruktur itu melanjutkan yang sudah dilakukan Kementerian PUPR pada periode 2015-2019 yang lalu.

Salah satu strategi lainnya adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan program *link and match* (magang) yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan.

Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan skema lainnya yang menarik bagi investor. Kementerian PUPR juga memiliki strategi untuk memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/ lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pemaketan.

Strategi Pembangunan Infrastruktur sektor PUPR 2020-2024 berikutnya adalah meningkatkan penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah dalam setiap infrastruktur yang terbangun, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor.

Kemudian, ada strategi menyederhanakan regulasi dan birokrasi, antara lain dengan revisi Peraturan Menteri (Permen) PUPR yang dianggap menghambat. Strategi pembangunan Infrastruktur sektor PUPR yang terakhir adalah mempercepat pengadaan barang dan jasa (lelang dini), agar infrastruktur diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas konstruksi.

Dengan dijadikannya KI sebagai salah satu target PEN oleh pemerintah, Kementerian PUPR melalui BPIW mendukung pengembangan KI sebagai bagian dari kawasan strategis secara terpadu. Hal itu

juga sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Perencanaan dan Pemrograman pengembangan KI Melibatkan Berbagai Pihak

Dalam membuat perencanaan dan pemrograman pengembangan KI, Kementerian PUPR melalui BPIW melibatkan berbagai pihak seperti dengan kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, swasta, institusi pendidikan, dan masyarakat profesional. Koordinasi yang dilakukan melalui berbagai pertemuan bilateral maupun regional seperti melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang dilakukan setiap tahun.

Adapun peserta Konreg ini terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan Provinsi, Dinas Keciptakarya Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air / Pengairan Provinsi, dan Dinas Terkait Perumahan Provinsi), dan Balai di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air (Balai Besar Wilayah Sungai).

Konreg yang telah digelar Februari-Maret lalu memiliki tiga tujuan, yakni pertama, menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai *readiness criteria* dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air, dan energi. Selain itu mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pelayanan dasar, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui jasa konstruksi.

Tujuan kedua, sinkronisasi program Kementerian PUPR dengan disepakati dan didukung oleh Pemda serta Kementerian/Lembaga terkait. Tujuan ketiga, sebagai bahan penyusunan usulan Kementerian

STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2020-2024

- Mendukung pengembangan wilayah seperti
1. KSPN, KEK, Kawasan Industri, Kawasan Bandara/Pelabuhan, dan kawasan produktif lainnya
 2. Meningkatkan kompetensi SDM
 3. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema KPBU dan skema lainnya
 4. Memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/lokal
 5. Meningkatkan penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri
 6. Menyederhanakan regulasi dan birokrasi
 7. Mempercepat pengadaan barang dan jasa



Sumber RPJMN 2020-2024

PUPR untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PUPR mendapat masukan terkait kebutuhan akan infrastruktur terutama dari Pemerintah Daerah. Dengan pola ini, maka pembangunan infrastruktur yang dilakukan memperhatikan kebutuhan yang ada di daerah. Sehingga diharapkan apa yang dibangun Kementerian PUPR dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. **(Redaksi)**

Dalam membuat perencanaan dan pemrograman pengembangan KI, Kementerian PUPR melalui BPIW melibatkan berbagai pihak seperti dengan kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, swasta, institusi pendidikan, dan masyarakat profesional



Pengembangan Kawasan Industri dan Harapan Pembangkit Ekonomi Nasional

Oleh: Indra Maulana, ST, MT

Jafung Pranata Humas BPIW

Indonesia harus menciptakan terobosan yang tidak biasa, terutama dalam tahap perencanaan, yang menentukan ke mana arah pengembangan dan pembangunan wilayah

Revolusi industri keempat selayaknya disambut sebagai momentum untuk melesatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju, terutama dalam menggerakkan roda-roda perekonomian masyarakat berbasis industri dan teknologi informasi. Era ini ditandai dengan semakin cepatnya informasi bergulir, semakin tingginya kebutuhan automasi, semakin samarnya batas-batas antar wilayah, dan menurunnya kebutuhan SDM dalam rantai produksi.

Seperti ditulis oleh Schwab (2016) dalam bukunya *The 4th Industrial Revolution*, bahwa dunia cepat sekali berubah, skala dan perubahan ini menjelaskan mengapa disrupsi dan inovasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan *urgent*. Dikatakannya bahwa revolusi industri keempat akan memiliki dampak monumental terhadap ekonomi global, begitu

luas dan beragam sehingga membuatnya sulit untuk menguraikan satu dampak dari dampak selanjutnya. Muncul integrasi dari berbagai inovasi, seakan satu dan lain elemen tidak dapat berdiri sendiri.

Terkait dengan momentum ini, tentunya Indonesia harus menciptakan terobosan yang tidak biasa, terutama dalam tahap perencanaan, yang menentukan ke mana arah pengembangan dan pembangunan wilayah ini akan bergerak. Kita tentu masih ingat saat Presiden Joko Widodo berbicara dalam *Annual Meeting IMF-World Bank* di Bali tahun 2018.

Beliau dengan cerdasnya berbicara pentingnya manusia bergerak dengan lebih cepat dan dinamis, dikala perang dagang menjadi tak terbatas dan inovasi melebihi apa yang manusia bayangkan sehingga tekanan terhadap pasar dan industri semakin berat. Dan pada tahun tersebut, perekonomian beberapa negara di dunia mengalami resesi bahkan krisis, sehingga kemudian beliau katakan dengan ungkapan terkenal dari serial *Game of Thrones* bahwa "*Winter is coming*".

Melihat fenomena tersebut, rancangan teknokratik Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disusun dengan lebih mengedepankan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan pada akhirnya RPJMN 2020-2024 menjadi dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan yang telah mengadopsi kebutuhan untuk membangun kawasan-kawasan yang cepat tumbuh dan memiliki *multiplier effect*.

Rencana pembangunan ini menetapkan 249 kawasan prioritas yang harus mendapat dukungan program infrastruktur. Dari jumlah tersebut, terdapat 27 Kawasan Industri (KI) dengan komposisi 14 KI di Sumatera, 2 KI di Jawa, 6 KI di Kalimantan, 3 KI di Sulawesi dan Maluku, 1 KI di

perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam 2 (dua) kuartal terakhir.

Langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional mendudukkan KI sebagai salah satu lokomotif dalam membangkitkan lesunya ekonomi serta mengatasi peningkatan angka pengangguran. Namun tentunya pengembangan KI perlu dukungan dari rencana tata ruang, akses infrastruktur dasar, dan kemudahan investasi sehingga mendorong adanya investor baru yang bersedia untuk membangun komitmen jangka panjang. Beberapa KI yang diprioritaskan dalam RPJMN 2020-2024 masih belum mendapat dukungan dari rencana tata ruangnya. Hal ini sebagaimana terjadi di Kabupaten Kendal Jawa



Gambar 1. Bendungan Gongseng yang diselesaikan saat pandemi

Papua, dan 1 KI di Nusa Tenggara. Jenis industri yang dikembangkan berupa industri manufaktur di Jawa dan Kepri serta industri pengolahan sumber daya alam untuk lokasi lainnya

Di tengah giatnya pemerintah menyiapkan berbagai skenario pengembangan KI, kemudian muncul pandemi Covid-19 yang berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan nasional. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam UU tentang Keekarantinaan Kesehatan membuat adanya perlambatan aktifitas ekonomi maupun pergerakan masyarakat sehingga ekonomi kemudian tumbuh negatif bahkan Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi yang ditandai

Tengah dan Kabupaten Muaro Jambi yang mana revisi tata ruangnya belum selesai.

Kehadiran Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dirancang sebagai salah satu kebijakan nasional untuk kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja skala besar. Beberapa pasal dalam UU tersebut mensyaratkan perlunya percepatan proses perizinan investasi, pengurangan rantai birokrasi, dan relaksasi dalam pemenuhan standar investasi.

Hal ini menjadi angin segar bagi para investor yang melihat bahwa *level ease of doing business* Indonesia masih berada di peringkat 73, jauh jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara

seperti Vietnam dan Thailand, apalagi jika dibandingkan Singapura dan Malaysia (World Bank, 2019).

Aturan terkait investasi ini termaktub dalam Bab X UUCK. Pemerintah pusat menekankan keseriusan dalam mendorong kebijakan investasi sebagaimana bunyi pasal 154 ayat 1 bahwa investasi pemerintah pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja. Pemerintah berdasar aturan tersebut bahkan membentuk lembaga khusus pengelola investasi. Pembangunan infrastruktur sebagaimana yang telah menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun terakhir kemudian terus mendapat porsi yang cukup dominan. Kementerian PUPR dalam pagu indikatif 2021 memperoleh anggaran 149 Triliun, terbesar dalam sejarah berdirinya kementerian ini. Konsentrasi pembangunan tentunya tidak dapat dilepaskan dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pengembangan KI sebagai strategi pemulihan ekonomi sangat terkait dan merupakan bagian dari pengembangan 10 (sepuluh) wilayah metropolitan. Wilayah perkotaan yang dihuni oleh lebih dari setengah dari penduduk negeri ini tentunya memberikan kontribusi bagi naik turunnya ekonomi. Oleh karenanya dukungan infrastruktur PUPR demikian masif bagi tumbuhnya kawasan-kawasan industri yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, mendorong adanya pembangunan lebih lanjut di banyak sektor,

dan secara cepat memulihkan pertumbuhan ekonomi kembali ke angka 5%.

Kajian Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di tahun 2020 terhadap Kawasan Metropolitan K e d u n g s e p u r memberikan rasa optimis bahwa dukungan terhadap tumbuhnya KI memberikan angin segar pemulihan ekonomi. Investasi infrastruktur diprediksi memberikan *multiplier output* hingga 2,29 kali. Angka ini sesuai dengan prediksi hasil kajian Kemenristek terhadap 10 (sepuluh) kawasan metropolitan yang memberikan angka rata-rata diatas 2 (dua) kali.

Kajian Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di tahun 2020 terhadap Kawasan Metropolitan Kedungsepur memberikan rasa optimis bahwa dukungan terhadap tumbuhnya KI memberikan angin segar pemulihan ekonomi

Dukungan infrastruktur terhadap KI di Pantura seperti Brebes, Batang, Kendal, Semarang, Demak hingga ke Gresik dan Bangkalan menjadi modal agar kawasan tersebut menjadi kutub-kutub pengembangan ekonomi wilayah. Namun industrialisasi tidak hanya menjadi



Kementerian PUPR mendukung perkembangan kota Metropolitan sebagai pendorong ekonomi

Sumber: Istimewa



Dukungan Pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Sumber: PUPR

dominasi Jawa, tak lupa wilayah timur Indonesia juga dikembangkan terutama untuk industri pengolahan bahan tambang dan mineral sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan.

Namun di balik kebijakan untuk mendorong ekonomi melalui pengembangan KI, kita tentunya tidak boleh lupa untuk memberikan stimulus kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga berperan sebagai *backbone* ekonomi masyarakat. Hal ini mendapat porsi perhatian dalam bentuk adanya Bantuan Presiden (Bapres). Ini merupakan berbentuk hibah untuk modal kerja bagi pengusaha UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini akan disalurkan ke pengusaha UMKM hingga Desember 2020 melalui bank penyalur, yakni Bank BRI dan BNI dengan target untuk pendanaan 12 juta UMKM. Pada akhirnya integrasi dari

berbagai upaya membangun Indonesia yang lebih maju melalui adaptasi terhadap revolusi industri keempat menjadi tidak optimal tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* termasuk pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Industrialisasi yang saat ini berjalan, harus berjalan dengan produktif, dengan memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif.

Seperti kita pahami, industrialisasi di satu sisi memberikan peningkatan pendapatan rata-rata, menciptakan stabilitas ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun di sisi lain dapat meningkatkan urbanisasi, pencemaran lingkungan, serta kesenjangan

pendapatan. Kita perlu siapkan strategi yang lebih komprehensif dengan “menggandeng” seluruh pemangku kepentingan dan tidak meninggalkan satu pihak pun di belakang.

Integrasi dari berbagai upaya membangun Indonesia yang lebih maju melalui adaptasi terhadap revolusi industri keempat menjadi tidak optimal tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder



Strategi Perencanaan & Pemrograman Infrastruktur PUPR Dalam Mendukung Kawasan Industri

Dr. Dita S.N.A Diliani, S.Sos.,M.Si

*Perencana Ahli Madya
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
BPIW Kementerian PUPR*

Pada periode 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan. Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah. Sedangkan pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar.

Kawasan Industri

Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pemerintah melakukan empat strategi. Strategi tersebut dilakukan untuk

Pemerintah telah mengeluarkan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan menetapkan 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan KI yang telah memiliki izin usaha (PP 24/2009).

m e n d u k u n g pengembangan suatu wilayah melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Salah satu strateginya adalah optimalisasi p e m b a n g u n a n kawasan strategis prioritas, seperti KI. KI di sini merupakan kawasan tempat

Pembangunan KI merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Aspek tata ruang dimaksud mencakup perencanaan, prasarana dan sarana penunjang seperti penyediaan energi listrik, telekomunikasi, fasilitas jalan dan lain sebagainya.

Pemerintah telah mengeluarkan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan menetapkan 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang mencakup 21 provinsi dan 86 kabupaten/kota. Ada 121 KI beroperasi per September 2020 mulai dari Sumatera hingga Sulawesi dan 38 kawasan sedang dalam tahap konstruksi.

Terjadi peningkatan dari sisi jumlah kawasan dan luas wilayah terutama untuk wilayah di luar Jawa yang ketersediaan lahannya masih lebih memungkinkan untuk dibangun KI. Untuk tahun 2020-2024, pemerintah berfokus pada 27 KI yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke-27 KI tersebut antara lain: 14 KI di Pulau Sumatera, 6 di Pulau Kalimantan, 3 di Pulau Jawa, Madura dan NTB, 2 di Pulau Sulawesi dan 2 di Pulau Maluku dan Papua (Gambar 1)

Peran Kementerian PUPR

Infrastruktur bidang PUPR memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan suatu wilayah. Untuk mendukung sektor industri khususnya pada KI, Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Ignatius Warsito pada *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi infrastruktur PUPR mendukung Pusat-



Gambar 1. Kawasan Industri Prioritas 2020-2024

Sumber: BPIW

Pusat Pertumbuhan di Sumatera, Jawa dan Bali pada tanggal 17 November 2020 memberikan masukan bahwa infrastruktur bidang PUPR yang paling dibutuhkan oleh kawasan industri adalah air baku dan akses jalan (gambar 2).

Dalam membangun infrastruktur mendukung pertumbuhan suatu wilayah, Kementerian PUPR menggunakan pendekatan secara kawasan andalan namun dimungkinkan untuk mendukung secara kawasan sektoral ketika adanya *directive* Presiden Secara kawasan andalan artinya terdapat beberapa sektor unggulan di dalamnya yang ketika diberi dorongan akan memberikan *multiplier effect* kepada sektor-sektor yang lemah di dalam kawasan andalan tersebut.

Sebagai contoh, Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan, merupakan *project* yang bersifat kawasan andalan karena di dalamnya terdapat dua atau lebih sektor unggulan yang perlu didukung antara lain kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman.

Sedangkan untuk 10 destinasi pariwisata prioritas dan Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi adalah contoh dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan yang bersifat sektoral (RPJMN 2020-2024). Jika Kementerian PUPR membangun infrastruktur PUPR untuk mendukung kawasan secara sektoral tentu akan menjadi beban yang cukup berat karena jumlah kawasan potensial yang perlu di dukung cukup

banyak namun di sisi lain Kementerian PUPR memiliki keterbatasan anggaran.

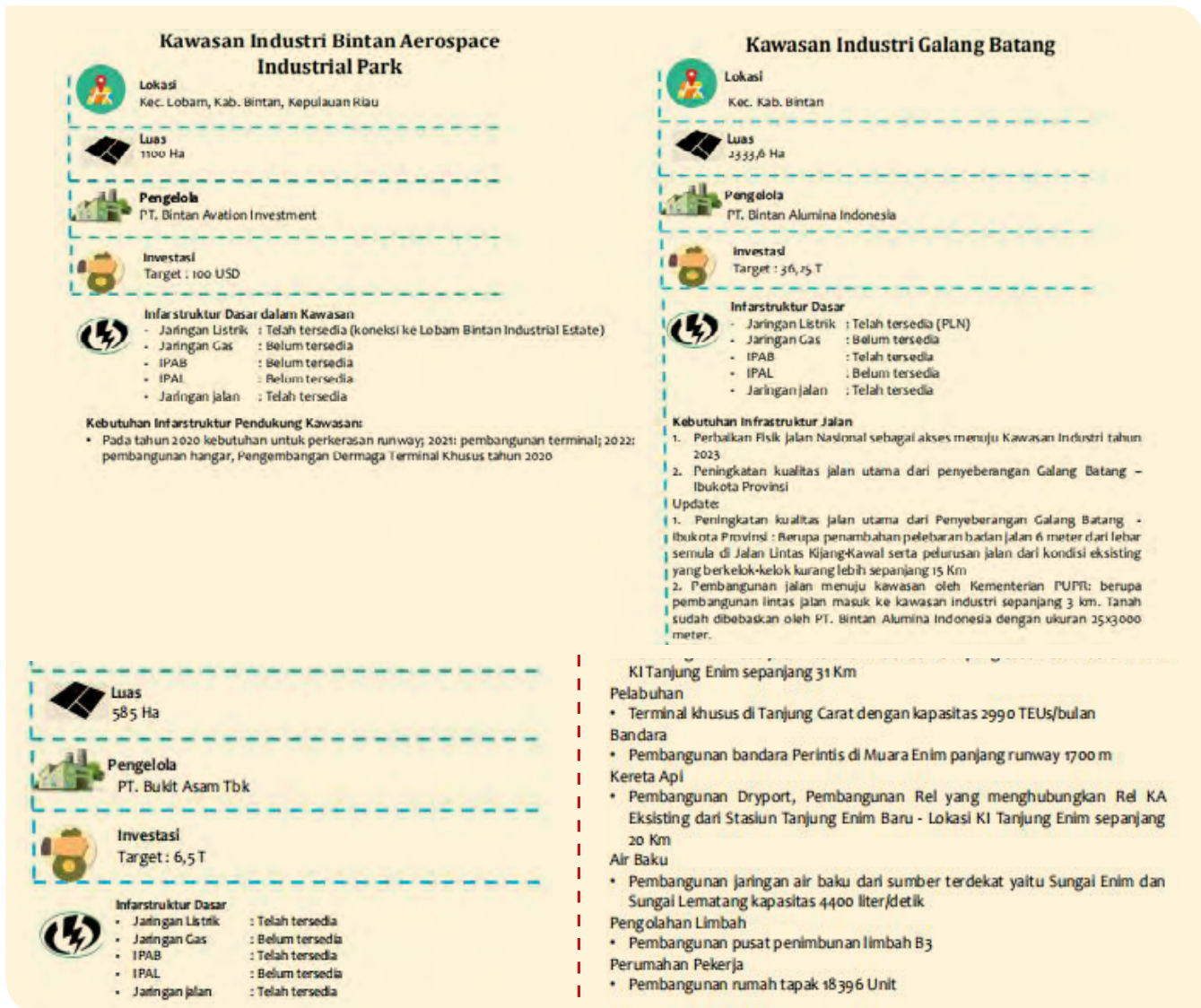
Oleh karena itu, perlu ada perencanaan dan pemrograman yang menyeluruh untuk penyediaan infrastruktur PUPR yang lebih efisien untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah, baik dalam rangka pemerataan maupun pertumbuhan melalui penentuan kawasan andalan.

Strategi Kementerian PUPR dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Industri

Untuk mengimplementasikan Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024, BPIW sebagai unit organisasi Kementerian PUPR memiliki tugas untuk menyusun kebijakan teknis dan rencana terpadu berbasis pengembangan wilayah perlu menyusun perencanaan dan pemrograman yang terukur dan akuntabel. Beberapa hal berikut dapat menjadi pertimbangan dalam memulai perencanaan dan pemrograman dimaksud:

10 destinasi pariwisata prioritas dan Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi adalah contoh dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan yang bersifat sektoral

1. Melakukan identifikasi permasalahan di wilayah lokasi kawasan itu dibangun secara umum yang



Gambar 2. Kebutuhan Infrastruktur di Kawasan Industri

Sumber: Kemenperin 2020

mencakup masalah sosial, ekonomi, lingkungan bahkan kelembagaan. Ada beberapa cara untuk melakukan identifikasi tersebut diantaranya dengan pendekatan “pohon masalah”. Dengan metode ini dapat diketahui masalah-masalah yang perlu dicarikan solusinya termasuk hal dimana Kementerian PUPR dapat mengambil peran;

2. Melakukan *review* terhadap wilayah yang dianggap mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional baik terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia atau yang dikenal sebagai Kawasan Strategis Nasional (PP 26/2008);

3. Melakukan *review* terhadap rencana induk Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan

pertumbuhan industri, misalnya Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Induk Transportasi Nasional (masih dalam proses) atau *roadmap* sistem transportasi nasional, RTRW Nasional dan Daerah, dan lain sebagainya;

4. Melakukan *review* terhadap *major project* RPJMN 2020-2024 terutama yang terkait langsung dengan peran Kementerian PUPR;

Review tersebut menjadi landasan dalam melakukan prioritas wilayah atau kawasan yang akan di dukung oleh Kementerian PUPR terhadap kawasan-kawasan potensial tentu dengan mempertimbangkan kinerja sektor ekonomi, sosial, budaya, dan daya dukung daya tampung lingkungan serta hasil analisa manfaat infrastruktur PUPR di wilayah tersebut baik secara administratif maupun cakupan wilayah pengembangan

strategis. Wilayah atau kawasan andalan yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur PUPR merupakan suatu aglomerasi kawasan sektor-sektor unggulan yang dianggap memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah.

Wujud strategi dukungan Kementerian PUPR dalam bentuk perencanaan adalah dengan dihasilkannya dokumen-dokumen perencanaan yang dikenal dengan istilah *Master Plan Development Plan* (MPDP) untuk wilayah tematik baik kawasan strategis maupun kawasan perkotaan/pedesaan. Sebelum ditetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, tugas penyusunan dokumen perencanaan ini berada di Pusat Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Perkotaan.

Dengan ditetapkan peraturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian PUPR yang baru, maka penyusunan dokumen perencanaan yang bersifat tematik atau wilayah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 1 (Sumatera dan Kalimantan), Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 2 (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) dan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 3 (Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua).

Nantinya, akan dihasilkan rencana induk pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan serta program jangka menengah (PJM) kawasan yang akan menjadi acuan bagi unit-unit organisasi teknis Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur dan juga menjadi acuan bagi K/L lain dalam sinkronisasi perencanaan dan pemrograman berbasis pengembangan wilayah.

Dukungan Perencanaan dan Pemrograman

Dokumen perencanaan (MPDP) pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah untuk KI yang dihasilkan oleh BPIW pada umumnya mengacu pada konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Beberapa contoh perencanaan yang dihasilkan terkait dengan dukungan terhadap KI salah satunya adalah Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru Bimindo (2016) dimana perencanaan pengembangan wilayahnya mencakup KEK Bitung, KEK dan KSPN Likupang, PKN Manado dan Bitung. Kemudian, untuk

dukungan pemrograman terhadap KI atau KEK dibahas dalam suatu forum yang disebut sebagai Konsultasi Regional (Konreg). Forum ini merupakan wadah diskusi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah dengan melibatkan unit organisasi teknis Kementerian PUPR dan pemerintah daerah. Selain Konreg, pada tahun 2020 direncanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) yaitu suatu forum diskusi dan sinkronisasi program jangka menengah antara Kementerian PUPR dengan Bappenas, Kementerian ATR dan K/L terkait untuk membahas sinkronisasi program dalam pembangunan berbasis kewilayahan.

Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh BPIW terkait penyusunan kebijakan teknis dan rencana program

Dokumen perencanaan (MPDP) pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah untuk KI yang dihasilkan oleh BPIW pada umumnya mengacu pada konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

terpadu bidang infrastruktur PUPR sudah mulai *on-track*, namun tetap masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam menghasilkan *output* yang lebih terukur dan akuntabel. Perlu digaris bawahi bahwa, Kementerian PUPR mendukung terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia dengan membangun infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah.

Infrastruktur PUPR dibangun untuk mendukung kawasan/wilayah yang teraglomerasi, dimana di dalamnya terdapat beberapa sektor unggulan namun di sisi lain dapat dilakukan secara sektoral melalui *directive* Presiden. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat adanya *budget constraint* dalam pembiayaan infrastruktur PUPR. Prioritisasi perlu dilakukan bukan sekedar *check list* kriteria yang berkesesuaian tapi juga melakukan review dan pengkajian lebih dalam variabel-variabel yang bersifat non-infrastruktur/teknis.

Dokumen perencanaan dan pemrograman yang telah dihasilkan oleh BPIW perlu diapresiasi dan bahkan bila perlu disempurnakan, sehingga menjadi pedoman penyusunan rencana dan program pengembangan wilayah bukan hanya untuk Kementerian PUPR tapi juga untuk K/L lainnya bahkan pemerintah daerah dan swasta. Oleh karena itu, cintailah produk-produk BPIW.



Pengembangan Kawasan Industri Butuh *Blue Print* dan Konsistensi

Agus Pambagio

Pengamat Kebijakan Publik

Perencanaan mempunyai peran yang penting untuk Pengembangan Kawasan Industri (KI) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bahwa perencanaan itu tidak berubah-ubah, agar tidak menimbulkan kesan amburadul.

Misalnya sudah diketahui bahwa ada KI Kendal, tapi dibangun juga KI Batang. Padahal jarak kedua KI itu dekat. Selain itu pengembangan KI dan KEK saat ini, banyak di Pulau Jawa, padahal di Pulau Jawa masih banyak areal persawahan yang perlu dijaga, sehingga tidak justru menjadi areal KI maupun KEK.

Apalagi pada periode awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dijanjikan pembangunan daerah terluar, tertinggal, dan terpencil. Daerah terluar, tertinggal, dan terpencil, kebanyakan berada di luar Jawa. Dengan demikian pembangunan tidak bersifat jawasentris atau hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga daerah di luar Jawa.

Bila dilihat kondisi KI Kendal dan Batang tadi, diketahui juga bahwa akan dibangun pelabuhan untuk mendukung KI tersebut. Padahal pelabuhannya dangkal dan sudah ada Pelabuhan Cirebon dan Semarang. Dilihat kondisi ini menunjukkan perencanaan belum matang dan hanya sekedar ada proyek. Kemudian, pembangunan infrastruktur sudah masif dilakukan, namun pengoperasiannya masih jadi tanda tanya. Contoh kawasan bandara Kertajati di Majalengka dan Yogyakarta International Airport (YAI)

di Kulon Progo. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kedua bandara tersebut, tidak paralel sehingga mengganggu operasional.

Seharusnya dalam pembangunan, tersebut pembuatan *study* kelayakan yang melibatkan ahli antropologi harus ada. Demikian pula kajian seluruh aspek, semestinya juga dilakukan pada pembangunan Trans Papua, sehingga tidak muncul pertanyaan: siapa yang akan melewati jalan tersebut. Bila kajian tidak maksimal, maka Trans Papua dikhawatirkan hanya digunakan oleh oknum *illegal logging* atau pembalakan liar, bukan masyarakat umum Papua.

Jadi membuat kebijakan itu semestinya benar-benar dimatangkan, sehingga pembangunan infrastruktur yang dibuat tidak sia-sia. Bila ada infrastruktur yang mubazir atau dibangun tapi tidak digunakan secara maksimal, maka penyaluran logistik tidak akan berjalan dengan baik.

Disamping itu, di Indonesia banyak bandara internasional. Padahal di negara lain tidak banyak bandara internasional, karena biasanya bandara internasional hanya berada di kota pusat pemerintahan atau pusat bisnis saja. Sedangkan bandara di kota-kota lain tidak perlu dibangun besar dan mewah, cukup fungsional saja: Pada kenyataannya, di Kabupaten Majalengka dibangun Bandara Internasional Kertajati. Demikian pula di Banyumas juga dibangun Bandara Internasional. Bila semua dibuat bandara internasional, yang naik pesawat siapa, terlalu banyak bandara. Persaingan

menjadi tidak sehat berebut penumpang yang tidak banyak.

Bila infrastruktur seperti itu banyak dibangun di Pulau Jawa, maka disparitas antara kawasan barat dan timur Indonesia makin lebar. Kondisi seperti ini harus diatur dengan kebijakan yang baik termasuk halnya dengan pengembangan KI untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bila ingin membuat peta sebaran pengembangan KI, bisa dimulai dengan membuka lembaran putih peta Indonesian lalu lihat ada infrastruktur jenis apa di daerah itu (misalnya jalan raya, rel kereta api dsb. kalau memadai baru rencanakan bangun KInya, termasuk juga kawasan pariwisata, dan KEK. Tidak hanya dikonsep semata, tapi benar-benar konsisten untuk diterapkan.

Konsisten itu juga harus dilakukan Kementerian PUPR yang banyak membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, waduk, perumahan, dan instalasi air minum. Memang tugas Kementerian PUPR membangun infrastruktur, namun pembangunan infrastruktur tersebut harus direncanakan dengan baik.

Termasuk juga dalam hal perencanaan dalam mendukung KI. Memberikan dukungan infrastruktur harus dilihat atau dikaji secara keseluruhan wilayah yang akan diberi dukungan tersebut. Contohnya kawasan Batang dan Kendal tadi, apakah bagian dari perencanaan yang dibuat BPIW atau tidak. Bila tidak termasuk bagian dari perencanaan BPIW, maka perencanaan kawasan lain yang sudah dibuat sebelumnya menjadi terbuang percuma.

Agar kondisi itu tidak terjadi, maka semestinya ketika ada direktif Presiden mengenai pengembangan KI, misalnya, yang berbeda dari perencanaan yang dibuat, maka Presiden harus diberi masukan berupa alternatif pengembangan yang memperhitungkan baik dari sisi positif maupun negatif dari pengembangan yang akan dilakukan.

BPIW juga harus memperhitungkan segala kondisi yang ada dan termuat dalam rencana induknya. Idealnya semua unit organisasi (unor) yang membangun infrastruktur sektor PUPR mengikuti lokasi yang di desain BPIW.

Demikian halnya dengan pihak-pihak yang ingin membangun pabrik dapat mengkoordinasikan

kebutuhan infrastrukturnya dengan BPIW. Termasuk juga dengan sektor lain, semestinya juga melakukan koordinasi dengan BPIW. Namun saya tidak tahu apakah disain yang dibuat BPIW diikuti unor-unor di lingkungan BPIW atau sektor lain.

Dalam hal konsep rencana induk KEK, saya melihat sedikit kacau. Contohnya KEK Sei Mangke di Sumatera Utara, sudah ada jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kini ada kawasan lain yakni Kawasan Industri Kuala Tanjung, yang jaraknya hanya 20 km dari Sei Mangke. Kondisi tersebut membuat bingung para investor yang sudah terlebih dahulu menanamkan modalnya di Sei Mangke. Akibatnya saat ini malah kedua KEK itu sulit berjalan.

Demikian pula rencana pembangunan bandara di Ibu Kota Negara (IKN). Padahal di Balikpapan sudah ada bandara. Pemikiran dasarnya apa?. Dari kondisi tersebut, menurut saya apapun kebijakannya harus konsisten, dan orientasinya bukan sekedar proyek saja. Presiden tidak dapat disalahkan karena beliau tidak tahu detailnya seperti apa. Menteri sektor terkait yang harus menjelaskan ke Presiden

Konsistensi dapat dilakukan dengan membuat *blue print* mengenai kawasan yang akan dikembangkan. *Blue print* ini harus ditaati semua pihak. Mestinya harus ada Menteri

yang menjadi *leader* dan berkuasa penuh dalam melaksanakan *blue print* tersebut.

Agar lebih kuat posisinya, maka dibuatkan dasar hukum, bisa dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Langkah seperti ini penting, karena walaupun saat ini sudah ada Kementerian Koordinator, namun masih terlihat belum padunya koordinasi yang dilakukan dan masih terjadi tumpang tindih kebijakan.

Jadi, siapapun sektornya yang diberi tanggung jawab, *blue print* harus ditaati semua sektor. Walaupun harus diubah, maka perlu dikoordinasikan semua sektor, agar jejak kebijakannya terlihat jelas. :

Siapapun sektornya yang diberi tanggung jawab, *blue print* harus ditaati semua sektor. Walaupun harus diubah, maka perlu dikoordinasikan semua sektor

Pengembangan Kawasan Industri Untuk Menyerap Tenaga Kerja

Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS

*Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*



Untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis, diantaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kendala yang dihadapi saat ini, salah satunya, adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah mendorong pengembangan Kawasan Industri (KI), sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja termasuk penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya. Dukungan infrastruktur yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan dapat mempercepat pengembangan KI di seluruh Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dr.Ir. Wahyu Utomo, MS memaparkan hal itu dalam rubrik wawancara berikut ini

Bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia saat ini?

Kondisi perekonomian Indonesia dilihat berdasarkan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan adanya kontraksi sejak Q2-2020, namun demikian kondisi ini sudah berangsur membaik. Demikian pula dengan kegiatan industri, sudah mulai bergerak membaik dan terjadi peningkatan aktifitasnya. Kedepannya, Kawasan Industri harus bisa memberikan dampak yang lebih signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menyiapkan 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Beberapa Peraturan Pelaksana yang disiapkan untuk mendukung Kawasan Industri adalah RPP tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN), RPP tentang Tata Ruang dan RPP tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. RPP ini bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Hampir 50 persen PSN berada dibawah tanggung jawab Kementerian PUPR dan penyelesaiannya akan berdampak langsung untuk mendukung pengembangan berbagai Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sejak Pandemi COVID-19, kondisi perekonomian di setiap daerah

mengalami penurunan, dan salah satu daerah yang paling terdampak adalah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara, yang mana perekonomian utamanya tergantung pada sektor pariwisata.

Salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi di Provinsi Bali, Kedepatian Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian bersama BPIW Kementerian PUPR sedang menyusun konsep pengembangan Wilayah Bali Utara dengan memanfaatkan rencana pembangunan bandara Bali Utara. Kita harus menyiapkan dan mendorong potensi daerah yang ada, agar pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut dapat memberikan dampak yang positif dan maksimal bagi masyarakatnya.

Langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran sebagai akibat dari Pandemi Covid-19?

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, 2,9 juta tenaga kerja baru yang merupakan lulusan dari universitas atau Pendidikan kejuruan masih belum mendapatkan pekerjaan. Dengan kondisi tersebut sangat jelas bahwa KI harus bisa mengambil peran untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pemerintah saat ini telah melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional

.....
KI harus bisa mengambil peran untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.



Kalau bicara KI, maka pastinya yang paling penting adalah sektor Infrastruktur, baik terkait konektivitas, sumber daya air, maupun Infrastruktur penyediaan gas.

(PEN), dan beberapa program/kegiatan juga sudah dilaksanakan untuk meningkatkan belanja pemerintah. Kementerian PUPR sudah responsif dan cepat bekerja untuk meningkatkan *government spending* melalui program pengadaan kontrak yang dipercepat. Hal ini juga diimbangi oleh peran BUMN yang melaksanakan program pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Bagaimana dengan program Padat Karya, apakah dapat membantu dalam upaya menciptakan lapangan kerja?

Program Padat Karya menjadi program penting yang harus dilakukan untuk beberapa waktu kedepan. Program padat karya ini harus disiapkan dengan baik di berbagai sektor dan bukan hanya di sektor PUPR saja. Program *cash for work* harus dikedepankan dalam artian bahwa pemerintah menciptakan lapangan kerja melalui program Padat Karya, dan sekaligus mempercepat realisasi pembangunan infrastrukturnya.

Pengembangan KI dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi bagian dari Program PEN. Bisa dijelaskan mengenai hal ini dan bagaimana

peran Kementerian PUPR terkait pengembangan kedua kawasan tersebut?

Pengembangan KI dan KEK sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan pengembangan yang dilakukan, dapat diharapkan hal ini akan meningkatkan daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia sehingga tentunya akan secara langsung menciptakan peluang penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Dalam pengembangan KI dan KEK, tentu diperlukan infrastruktur pendukung yang harus dibangun baik itu infrastruktur konektivitas, maupun infrastruktur utilitas. Kementerian PUPR sangat aktif memberikan dukungan yang diperlukan ini, seperti konektivitas dari KI atau KEK ke pelabuhan, infrastruktur di perkotaan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang dapat memberikan *multiplier effect* baik saat konstruksi maupun setelah operasi.

Faktor apa yang paling penting dalam pengembangan KI?

Kalau bicara KI, seperti yang saya sebutkan diatas, maka pastinya yang paling penting adalah sektor infrastruktur, baik infrastruktur konektivitas, maupun infrastruktur dasar (air baku, pengolahan limbah, gas dan energi). Demikian juga tentang pasokan listrik dan gas dengan harga yang bersaing, tentunya hal ini merupakan kebutuhan yang sangat signifikan untuk mendukung KI dan KEK. Disamping itu, diperlukan juga insentif baik fiskal dan non fiskal akan sangat berperan penting untuk meningkatkan daya Tarik Kawasan tersebut.

Seperti apa rencana pengembangan KI di Indonesia?

Kita punya super koridor KI di Pulau Jawa yang berada di Jawa Bagian Utara. Kementerian PUPR juga mempunyai program dukungan infrastruktur KI di Jawa Timur khususnya di bagian Utara seperti Gresik dan Tuban. Dukungan infrastruktur sektor PUPR berupa jalan

tol sudah tersambung di hampir semua Kawasan tersebut. Selain penyediaan infrastruktur sektor PUPR, terdapat juga infrastruktur sektor perhubungan yang juga mendukung pengembangan KI dengan penyediaan moda transportasi lainnya, seperti kereta api dan pelabuhan.

KI lain yang juga akan dikembangkan pemerintah yakni KI di Kawasan Karawang, Kendal, Batang, dan Brebes. Semua KI tersebut telah disiapkan programnya. Arah pengembangan KI ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang untuk pengembangan Jawa Tengah dan Perpres Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, untuk pengembangan Jawa Timur. Pada intinya, di dalam Perpres tersebut, telah diindikasikan daerah mana yang akan didorong menjadi faktor utama – *pull factor* dan yang mana sebagai pendukung – *push factor*. Sehingga dengan demikian, kita akan mempersiapkan pengembangan semua kawasan secara terintegrasi.

Sebagai contoh, kita memiliki tantangan tersendiri dalam

SUPER KORIDOR JAWA

Sektor industri di Jawa, terpusat di Super Koridor Jawa Bagian Utara, yang terdapat berbagai kegiatan industri eksisting maupun rencana pada Super Koridor Pantura, termasuk rencana Kawasan Industri.

Tantangan Pengembangan Super Koridor

Perlunya integrasi pengembangan Super Koridor Ekonomi Jawa Bagian Utara melalui peningkatan dan optimalisasi infrastruktur transportasi dan konektivitas.

mengembangkan KI Batang, karena lokasinya yang sangat dekat dengan KEK Kendal. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipersiapkan kegiatan utama dari Kawasan industri tersebut. Tentunya perlu juga adanya pengendalian pembangunan di kedua Kawasan tersebut sehingga akan tercipta kondisi yang kondusif dan terintegrasi anatar pembangunan di KI dan KEK. Kita akan terus mendorong pengembangan kawasan-kawasan tersebut bisa bersinergi dan saling melengkapi agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain.

Bagaimana pula dengan kawasan diluar Jawa, apakah juga akan dikembangkan?

Ya, tentu kita akan kembangkan juga, seperti di Pulau Sumatera terutama di

.....

Kita juga mengharapkan pengembangan kawasan bisa bersinergi dan saling melengkapi agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain.

Sektor Industri di Sumatera terpusat di KORIDOR PESISIR TIMUR

Terdapat berbagai kegiatan industri eksisting maupun rencana pada koridor Sumatera, termasuk rencana KI Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, dan Kawasan Industri Medan.



Dengan kerja sama semua pihak termasuk dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian PUPR, kami yakin dapat mendorong KI dan KEK agar lebih cepat berkembang.

sisi timur Sumatera, karena sudah ada jalan tol, maka kita siapkan juga kawasan industrinya. Kita bersama BPIW akan menyiapkan kebutuhan infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung KI tersebut.

Demikian pula di Pulau Batam, kita coba sinkronkan program pengembangannya. Saat ini kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang pengembangannya masih terpisah satu sama lain. Kemenko Perekonomian akan Menyusun konsep pengembangan wilayah untuk mensinkronkan dan mensinergikan program pengembangan kawasan-kawasan tersebut. Pengembangan wilayah harus disinergikan satu dengan yang lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun lebih efisien, sebagai contoh rencana pembangunan jembatan dari Batam ke Bintan.

Selain masalah aksesibilitas, terdapat juga permasalahan ketersediaan air. Kita tahu bahwa Batam merupakan daerah yang sudah siap terbangun dan membutuhkan suplai air baku yang besar sehingga perlu disiapkan infrastrukturnya. Sehubungan dengan hal itu, semua regulasi akan disiapkan untuk percepatan pengembangan Kawasan.

Seperti apa upaya percepatan yang dilakukan untuk pengembangan KI dan juga kawasan lain?

Selain dengan kementerian teknis, kami melakukan koordinasi dengan Kemenko Maritim dan Investasi untuk bersama-sama mendorong percepatan pembangunan KI dan KEK. Dengan kerja sama semua pihak termasuk dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian PUPR, kami yakin dapat mendorong KI dan KEK agar lebih cepat berkembang.

Bagaimana pula kesiapan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur maupun pengembangan kawasan?

Pendanaan pembangunan infrastruktur saat ini masih sangat tergantung pada APBN, namun kedepannya, perlu dicari beberapa alternatif pembiayaan (*creative financing*). Pada RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur membutuhkan Rp 6.445 triliun dan *gap* pendanaan untuk Kementerian PUPR sekitar Rp 1.400 triliun. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dicari sumber pendanaan lainnya selain APBN. Hal ini penting, karena bila suatu kawasan sudah siap untuk dikembangkan, namun pendanaannya tidak siap, maka pengembangan kawasan tersebut tidak dapat berjalan maksimal. Saat ini, Pemerintah telah menerbitkan Perpres no 32/2020 tentang Hak Pengelolaan Aset Terbayar (*Limited Concession Scheme*). Melalui Perpres ini, aset yang berupa Barang Milik Negara (BMN) bisa *direcycle* sehingga dapat memberikan *upfront payment yang* tentunya hal ini akan merupakan pendanaan alternatif untuk memperkuat pemerintah dalam pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maupun pengembangan kawasan. **(Hendra Djamal)**



Kementerian PUPR Bergerak Cepat Membangun Infrastruktur Untuk Dukungan Kawasan Industri Terpadu Batang

Pembangunan kawasan industri saat ini menjadi perhatian khusus sebagai andalan dalam pemulihan ekonomi nasional. Aktivitas industri mampu memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian nasional, salah satunya penyerapan tenaga kerja. Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar Pemerintah bekerja keras membangun kawasan industri di sepanjang super koridor ekonomi Pantai Utara Jawa.



Kawasan Industri (KI) Batang di Pantura Jawa Tengah sedang dikembangkan dalam waktu singkat. KI Batang dirancang mampu mengundang investasi berkualitas, bersinergi dengan UMKM, memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pembangunan KI Terpadu Batang termuat dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Isu Strategis dan Rencana Pengembangan

Pembangunan KI Terpadu Batang ini menjadi momentum rencana relokasi industri dari luar negeri yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. Sesuai arahan Presiden, KI Terpadu Batang akan dibangun di atas lahan PTPN IX seluas 4.300 Ha yang siap dikonversi menjadi kawasan industri.

Pengembangan KI Batang direncanakan dalam 3 (tiga) klaster dengan 4 (empat) tahap pengembangan dari 2020 hingga 2024. Pada pengembangan fase awal (tahun 2020), KI Batang dibangun seluas 450 Ha di tiga lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang berada di Afdeling Mangunsari Kebun Siluwok.

Pada tahun berikutnya, KI Batang akan dikembangkan seluas 2.650 Ha (Tahap 2), 800 Ha (Tahap 3), dan 400 Ha (Tahap 4). Investor ditargetkan telah masuk mulai dari Tahun 2021 hingga 2024. Oleh karena itu, pemenuhan infrastruktur pendukung KI Terpadu Batang harus cepat disediakan, seperti pembangunan jalan dan penyediaan air bersih untuk kawasan industri.

Ketersediaan dan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur PUPR

Untuk menuju Kawasan Industri Batang, saat ini telah tersedia akses melalui Jalan Nasional Bts. Kota Batang - Bts. Kab. Kendal atau dapat melalui Jalan Tol Batang - Semarang. Namun untuk akses langsung menuju kawasan industri diperlukan pembangunan jalan di dalam kawasan industri dan akses menuju jalan nasional.

Kebutuhan air untuk KI Batang berdasarkan perhitungan diperkirakan total sebesar 1.580 Liter/detik. Pada tahap pertama, 450 Ha pengembangan KI Batang membutuhkan *supply* air sebesar 285 Liter/detik. KI Batang yang terletak di Wilayah Sungai Pemali-Juana memanfaatkan sumber air baku dari Bendung DAS Urang dan Bendungan Kedung Langgar.



Staging pengembangan kawasan Batang Jawa Tengah

Sumber: BPIW



Sebaran kebutuhan pembangunan infrastruktur mendukung KI Batang

Sumber: BPIW

Aktivitas perindustrian tentu akan menghasilkan timbulan air limbah yang perlu ditangani melalui pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Pada tahap pertama, Timbulan air limbah akan sebesar 207 Liter/detik. Total timbulan air limbah untuk KI Batang sebesar 1.265 Liter/detik.

Selain menghasilkan air limbah, kegiatan industri juga menghasilkan limbah padat atau sampah. Dengan proyeksi 450 Ha pengembangan di KI Batang diestimasi menghasilkan sampah hingga 659 m³/hari. Untuk menampung timbulan sampah hingga 4.400 m³/hari diperlukan pembangunan fasilitas persampahan seperti TPS 3R yang ramah lingkungan di dalam kawasan industri.

Masuknya tenaga kerja di KI Batang akan mendorong kebutuhan penyediaan hunian khusus untuk tenaga kerja. Estimasi kebutuhan hunian dalam bentuk rumah susun diperlukan hingga 10 *Twin Block* (TB).

Sebagai proyek strategis nasional, akselerasi pembangunan KI Terpadu Batang dilakukan untuk menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan *competitiveness* nasional.

Penyediaan infrastruktur yang memadai perlu dipercepat agar dapat menangkap peluang investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sinergi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengembang perlu terus didorong untuk mendukung keberhasilan pembangunan KI Terpadu Batang.

Kementerian PUPR dalam hal ini mendukung penyediaan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di sektor konektivitas, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Dan Perumahan. (nab)

Bangun Infrastruktur Pendukung KEK dan KI, Upaya Tingkatkan Daya Beli Masyarakat



Kepala BPIW Hadi Sucahyono (tengah) berdialog dengan Presiden Direktur dan CEO Kendal Industrial Park Stanley Ang (paling kiri) serta Executive Director Didik Purbadi (paling kanan)

Sumber: Daris/BPIW

Daerah perkotaan menjadi episentrum penyebaran Covid 19. Perkotaan juga terdampak cukup besar dengan ancaman peningkatan kemiskinan, angka pengangguran serta penurunan pendapatan ekonomi. Berikut salah satu upaya yang ditempuh Kementerian PUPR untuk mengatasi dampak Covid-19

Upaya mengatasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, salah satunya memberikan dukungan infrastruktur PUPR terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) yang berada di perkotaan.

“Pengembangan tersebut dilakukan, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja yang banyak, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat,” ungkap Kepala BPIW, Hadi Sucahyono dalam Talk Series I BPIW Virtual Expo 2020 di Jakarta, Senin 16 November 2020.

Saat ini Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR di 10 kawasan metropolitan. Hal tersebut sekaligus dalam rangka pemulihan ekonomi setelah terdampak Covid 19. “Selain itu juga untuk mengurangi kesenjangan dan disparitas wilayah,” terang Hadi.

Menurutnya, pandemi Covid-19 juga memukul beberapa sektor kehidupan, seperti pariwisata mengalami pelambatan akibat

kunjungan domestik dan mancanegara yang anjlok. Kerugian pada sektor pariwisata juga berdampak pada sektor-sektor potensial lainnya seperti sektor transportasi, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor jasa logistik.

Menurutnya, untuk pemulihan ekonomi nasional pemerintah juga melakukan pembangunan 831 Km jalan baru dan 35 Km jalan bebas hambatan, penanganan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan dukungan pembangunan tempat FIFA World Cup U-20, serta pembangunan 111.200 unit rumah swadaya.

Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR telah melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang lebih fokus pada lima program yaitu program dukungan manajemen, program ketahanan sumber daya air, program infrastruktur konektivitas, program perumahan dan kawasan permukiman, serta program

.....
Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR di 10 kawasan metropolitan. Hal tersebut sekaligus dalam rangka pemulihan ekonomi setelah terdampak Covid 19.

Satu dari 10 kawasan metropolitan yang telah disusun master plan-nya oleh BPIW adalah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Di Metropolitan Kedungsepur ini menggabungkan semua aspek



Kepala BPIW Hadi Sucahyono (kanan) sedang memantau kawasan Kedungsepur

Sumber: Daris/BPIW

pendidikan dan pelatihan vokasi. “Dengan redesain ini maka kegiatan Kementerian PUPR yang semula 93 kegiatan, diefektifkan menjadi 50 kegiatan,” ujar Hadi .

Selain anggaran dari APBN, menurut Hadi masih diperlukan kerja sama dan peran semua pemangku kepentingan , termasuk pihak swasta, Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan Pemerintah Daerah (Pemda) , terkait pembiayaan infrastruktur .

Ia juga menyatakan bahwa Kementerian PUPR selalu berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga , Cipta Karya, dan Perumahan berbasis pengembangan wilayah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan akses infrastruktur untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial untuk masyarakat.

Saat ini pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia telah

mengimplementasikan konsep Kota Cerdas. Sebagai contoh, Metropolitan Jakarta yang menerapkan *Transit Oriented Development* (TOD) seperti Integrasi Moda dengan Pusat-Pusat Kegiatan dan Moda Raya Terpadu (MRT). Termasuk, penerapan transparansi data perencanaan.

Satu dari 10 kawasan metropolitan yang telah disusun *master plan*-nya oleh BPIW adalah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Di Metropolitan Kedungsepur ini menggabungkan semua aspek seperti aspek konektivitas, ketahanan pangan, sumber air, peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, serta aspek lainnya.

Tidak hanya membangun infrastruktur sektor PUPR berbasis pengembangan wilayah, menurut Hadi BPIW juga telah menghitung peningkatan manfaat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

12 Kawasan Ekonomi Khusus



pada metropolitan tersebut. “Dengan demikian yang kita tuju tidak hanya *output*, tetapi juga *outcome*,” tutur Hadi.

Di lingkungan Kementerian PUPR sendiri pendekatan “cerdas” telah diterapkan pada sejumlah tempat. “Gedung-gedung dan kawasan perkantoran di Kementerian PUPR menerapkan hemat listrik, hemat air, *recycling*, dan *reuse*. Selain itu, bangunan disini menerapkan green building,” tutur Hadi. Terobosan teknologi berupa rumah tahan gempa juga telah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa daerah. Selain itu, Kementerian PUPR telah membuat “program cerdas” berupa Padat Karya Tunai. Hal ini untuk membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, terutama sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Menurut Hadi, BPIW telah menerapkan *smart planning and programming* dalam pembangunan

infrastruktur PUPR, yaitu dengan melakukan penyusunan rencana dan sinkronisasi program melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang digunakan yaitu SIBAS RIPI PUPR (Sistem Informasi dan *Database Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPro (Sistem Informasi Pemrograman).

Sinkronisasi program tersebut juga dilakukan melalui mekanisme Konsultasi Regional (Konreg), dimana beberapa wilayah dilakukan dengan memanfaatkan *teleconference*.{**}

.....
Terobosan teknologi berupa rumah tahan gempa juga telah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa daerah. Selain itu, Kementerian PUPR telah membuat “program cerdas” berupa Padat Karya Tunai.

Sinergi Program Infrastruktur Pusat dan Daerah Berbasis Spasial



Judul Buku :

**Pendekatan Program Berbasis Spasial:
Mewujudkan Sinergi Pembangunan Nasional dan Daerah**

Penulis :

Djuang Fadjar Sodikin, ST, MT, M.Sc, Ph.D

Penerbit :

Cendekia

Tahun Terbit : 2020

Halaman : 238

ISBN : 9786237438779

Dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, kerap dijumpai proyek yang terlambat selesai, atau program yang nampak sudah selesai tetapi belum memberikan manfaat secara optimal. Berbagai pendekatan telah dicoba untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya konsep pembangunan secara komprehensif, holistik, tematik, pembangunan berkelanjutan, sampai pembangunan dengan pengarusutamaan gender.

Namun bukan pendekatan pembangunannya yang kurang tepat, melainkan belum dipahaminya konsepsi

pendekatan tersebut secara utuh dan keterbatasan pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan dan membumikan pendekatan tersebut. Hal ini karena suatu pendekatan pembangunan akan dapat diterapkan secara efektif ketika diberlakukan pada tiap tahapan pembangunan dan diinternalisasikan pada organisasi dan individu sebagai penggeraknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis buku ini menawarkan konsep Pendekatan Program Berbasis Spasial yang menjadi dasar pemikiran dan mengarahkan cara menganalisis kebutuhan program yang diperlukan, guna mencapai sinergi pembangunan yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Buku ini juga membahas tentang bagaimana suatu pendekatan diterapkan dalam sistem pembangunan nasional dan daerah saat ini.

Pada bab 2 penulis membahas tentang Konsepsi Proses Tahapan Pembangunan. Keluaran bab ini adalah model besar yang menggambarkan alur proses tahapan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pembahasan diawali dengan penjabaran proses yang dilakukan di dalam sebuah organisasi, yaitu proses kerja, proses perilaku, dan proses perubahan.

Proses kerja dipaparkan sebagai urutan kegiatan yang mentransformasi *input* menjadi *output*. Proses perilaku adalah pola dan cara bertindak dalam sebuah organisasi yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sedangkan proses perubahan adalah urutan peristiwa yang menggambarkan bagaimana individu, kelompok, dan organisasi, beradaptasi, berkembang, dan tumbuh.

Penulis mengkaji model Proses Kebijakan-Perencanaan-Implementasi (*Policy-Planning-Implementation Process/ PPIP*) oleh Alexander (1979), Model Hubungan Strategi dalam Program dan Proyek oleh Kor dan Wijnen (2007) dan beberapa

Model Produksi Kinerja Organisasi. Ketiga model tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, lalu penulis mengkonsolidasikan ketiganya sehingga terbentuk satu model kerangka kerja besar yang terintegrasi, yang dinamakan Model Proses Pembangunan.

Pada bab 3 penulis memaparkan tentang Kompleksitas Kerja Program Pembangunan. Hal ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa proses pembangunan tidak selalu berjalan linear sebagaimana tergambar dalam berbagai model. Pembangunan cenderung dinamis sehingga memiliki keadaan yang kompleks. Ada lima aspek yang mempengaruhi tingkat kompleksitas suatu program pembangunan, yaitu tipologi program, elemen integrasi, kebutuhan untuk bekerja sama, kemungkinan risiko program dan proyek, dan tingkat kepentingan, urgensi, dan resistensi suatu program.

Program pembangunan adalah entitas yang kompleks sehingga perlu mendapat perhatian serius dalam pengelolaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kompleksitas program dipengaruhi oleh proyek dan kegiatan/elemen lain yang menjadi bagian program, juga bagaimana interaksi dan kerjasama antar personel di dalam organisasi yang terlibat.

Pada bab 4 penulis mulai membahas cakupan yang lebih luas, yaitu Sistem Pembangunan Nasional. Tujuan dari bab ini adalah mengidentifikasi tantangan dalam penyelenggaraan program/proyek yang berasal dari sistem pembangunan nasional yang berlaku saat ini. Adapun sistem nasional yang dibahas yaitu sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem evaluasi.

Pada bab 5, penulis mengulas mengenai Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Negara Lain. Bab ini muncul karena di Indonesia belum ada sistem permanen yang mampu mengintegrasikan perencanaan dan implementasi. Sementara di beberapa negara sudah lama menerapkan sistem *Planning, Programming, and Budgeting System* (PPBS).

Dari sistem PPBS kita bisa melihat bagaimana negara lain mengelola proses pembangunan yang panjang dan melibatkan banyak pelaku dengan beragam detailnya. Salah satu sampel yang digunakan penulis dalam bab ini adalah sistem di Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

Pada bab 6 penulis mulai memasuki pembahasan inti, yaitu Esensi Pendekatan Program Berbasis Spasial. Dari bab-bab sebelumnya terungkap bahwa proses pembangunan fisik harus melalui tahapan yang panjang apalagi jika harus mengkoordinasi banyak proyek. Sistem pemerintahan desentralisasi seperti di Indonesia menuntut keterlibatan banyak pihak dan menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan pembangunan yang sinergis. Namun, pengalaman negara lain menunjukkan sinergisitas itu sangat mungkin terwujud. Oleh karena itu bab ini ingin menjawab tantangan di atas melalui Pendekatan Program Berbasis Spasial (PPBSp). Konsepsi PPBSp di dalam buku ini merupakan penggabungan 2 konsep dari disiplin manajemen program dan perencanaan (tata ruang).

Bab 7 membahas mengenai bagaimana Menerapkan PPBSp pada Tiap Tahapan Pembangunan. Bab ini membahas mengenai hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan PPBSp di setiap tahapan pembangunan mulai dari penilaian kebutuhan sampai pada tahap evaluasi. Sekali lagi penulis menekankan bahwa tujuan penerapan PPBSp ini adalah untuk menjadikannya sebagai budaya yang mengakar dalam cara kerja individu dan organisasi penyelenggara program pembangunan.

Bab terakhir, yaitu bab 8 membahas bagaimana Mempersiapkan Organisasi Manajemen Program. Dengan organisasi yang disiapkan dengan baik, maka penerapan PPBSp akan lebih terstruktur dan sistematis. Dalam menyiapkan organisasi, konfigurasi formal struktur organisasi memberikan kekuatan dan pengaruh, namun konfigurasi informal juga memiliki peran yang menentukan. Konfigurasi informal adalah pola interaksi dan komunikasi antar individu dan antar organisasi. Oleh karena itu keduanya harus disiapkan dengan baik.

(Mutri Batul Aini)

Infrastruktur *Food Estate* untuk Pemulihan Ekonomi Nasional



Daerah Irigasi Komering Sumsel

Sumber: PUPR

Isu ketahanan pangan saat ini menjadi fokus yang sangat penting bagi dunia. Bahkan masalah pangan telah menjadi tujuan SDGs yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi faktual bahwa saat ini penduduk dunia makin bertambah dan kebutuhan pangan pun turut mengiringinya secara eksponensial. Di Indonesia saja, pertumbuhan penduduk per tahunnya tercatat kurang lebih 3 juta jiwa, sehingga pada tahun 2020 ini diperkirakan penduduk Indonesia telah mencapai 270 juta jiwa.

Pertambahan jumlah penduduk tersebut sayangnya tidak diiringi dengan pengelolaan potensi pertanian di Indonesia sehingga saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara importir pangan. Ini menjadi sangat ironis karena Indonesia terkenal dengan negeri agraris yang sebagian besar penduduknya bertani.

Kondisi ini diperparah dengan maraknya konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri. Hal ini mengakibatkan luasan lahan pertanian khususnya sawah menjadi makin sempit. Gaya hidup masyarakat Indonesia yang cenderung menyukai makanan cepat saji juga menyebabkan bahan pangan lokal turun pamor dan makanan impor makin naik daun.

Jika ditelusur lagi, masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi pada sektor pertanian ini. Misalnya bahwa pertanian di Indonesia masih dominan usaha tani skala kecil yang kerap menemui keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi. Pada intinya, sektor pertanian sangat

membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk bisa bangkit menuju swasembada pangan.

Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 yang melindungi lahan tanaman pangan. Regulasi ini menuntut adanya lahan abadi yang melindungi upaya alih fungsi lahan. Pada 2019 Presiden Joko Widodo juga menundaklanjuti Undang-undang tersebut dengan menerbitkan Perpres nomor 59 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Dalam Perpres itu, Pemerintah Daerah harus menyepakati luasan lahan sawah abadi yang kemudian akan ditetapkan oleh kementerian ATR. Pelanggaran terhadap lahan pertanian abadi yang telah ditetapkan akan dikenai sanksi pidana.

Infrastruktur Pendukung Food Estate

Kondisi pandemi yang melanda dunia setahun ini telah berdampak di Indonesia di antaranya mengakibatkan pengangguran yang terus bertambah. Menteri PUPR mengatakan bahwa tahun depan setidaknya harus ada

.....
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 yang melindungi lahan tanaman pangan. Regulasi ini menuntut adanya lahan abadi yang melindungi upaya alih fungsi lahan.

.....

Untuk memenuhi target ketahanan air dan pangan secara nasional, khususnya penyediaan air baku sebesar 54,81 m³/detik pada 2024, Kementerian PUPR juga terus melanjutkan pembangunan bendungan baru di sejumlah provinsi.

Persawahan membutuhkan dukungan irigasi

9 juta lapangan kerja baru untuk menyerap para pengangguran yang terdampak Covid-19. Untuk mendukung penciptaan lapangan kerja itu, ada empat program utama Kementerian PUPR di tahun 2021, yaitu pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT; Dukungan pengembangan kawasan industri; Dukungan pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas; Serta Program Padat Karya Tunai (PKT).

Proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah, seperti diberitakan antaranews.com 2 September 2020, dilakukan dengan rehabilitasi saluran irigasi, pintu air dan jembatan, serta membangun jalan akses untuk mendukung pembudidayaan padi dan singkong. *Food estate* padi dikerjakan di atas lahan seluas 165 ribu hektar dan singkong di 60 ribu hektar. Proyek ini dimaksimalkan untuk pengusaha lokal agar bisa menyerap tenaga kerja. Jika ada pengusaha besar ingin masuk,

maka harus bekerja sama dengan pengusaha daerah dengan sistem KSO.

Food Estate di Sumatera Utara difokuskan di Humbang Hasundutan. Di lahan seluas 4 ribu hektar akan dikembangkan tanaman hortikultura Bersama Kementerian Pertanian. Tugas Kementerian PUPR adalah menyediakan air baku, membangun sumur, drainase, serta membangun jalan akses. Sementara pengembangan *food estate* di NTT dipusatkan di Kabupaten Sumba Tengah.

Selain itu, pembangunan jaringan irigasi juga dilakukan Kementerian PUPR di lima jaringan irigasi yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu bertujuan untuk mendukung produktivitas sentra-sentra pertanian. Bendungan Lhok Guci Aceh yang rampung dibangun pada 2008 lalu juga merupakan salah satu proyek yang kini sedang dibuatkan jaringan irigasinya. Sumber antaranews.com akhir Agustus lalu



Sumber: Istimewa

menyebutkan bahwa saat ini tengah diselesaikan sekaligus dua jaringan irigasi yang totalnya akan mengairi area seluar 21.750 hektar di Aceh.

Perihal pembangunan infrastruktur pendukung *Food Estate* ini, sumber [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) 3 September lalu mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR telah mendapat tambahan pagu anggaran 2021 sebanyak 34 triliun sehingga total pagu anggaran PUPR tahun 2021 adalah 149,81 triliun. Hal ini karena Presiden menugaskan Kementerian PUPR untuk meneruskan pembangunan infrastruktur *food estate* dan pembangunan Kawasan Industri.

Pagu tersebut akan difokuskan untuk 6 program yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19. sumber [industry.co.id](https://www.industry.co.id) pada 16 September lalu menyebutkan 6 program tersebut yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat,

peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dengan demikian tugas bagi Kementerian PUPR tahun depan sangat berat. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan-kawasan penting ditugaskan pada Kementerian PUPR. Infrastruktur jalan, bendungan, irigasi, perumahan, drainase, air minum, dan lain-lain tidak boleh hanya sekedar dibangun namun pemanfaatannya kemudian tidak maksimal. Tugas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai badan perencana dan pemrograman untuk terus mengawal agar pembangunan tetap sinergi antarsektornya sehingga mampu mendatangkan hasil akhir yang maksimal.

(Mutri Batul Aini)

PENGERJAAN PROYEK

BERLANJUT, PEKERJA

KONSTRUKSI PUN SENANG



Sumber: Birkom PUPR

Pandemi Covid-19 banyak berdampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor konstruksi. Pembatasan mobilitas sampai pembatasan wilayah sempat menghambat proses pengerjaan konstruksi infrastruktur. Seperti apa langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menciptakan pengerjaan konstruksi terus berjalan sekaligus tetap melakukan pencegahan penyebaran Covid-19? Berikut ulasannya.

Para pekerja melakukan pengecoran jembatan di jalan tol Trans Sumatera



Kegiatan proyek di Jakarta berjalan kembali ditengah pandemi

Sumber: Istimewa

Kementerian PUPR berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Salah satunya untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi, kendati pandemi Covid-19 belum berakhir.

Salah satu langkah pencegahan Covid-19 telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan menerbitkan Instruksi Menteri (Inmen) No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, Trisasongko Widiyanto menyatakan, Instruksi Menteri tersebut merupakan bagian dari kebijakan untuk mewujudkan keselamatan konstruksi, kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi.

Menurutnya, protokol tersebut berlaku pada proyek konstruksi yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, maupun investasi swasta dan atau gabungan. Instruksi Menteri tersebut memuat mekanisme tentang protokol pencegahan Covid-19 dalam



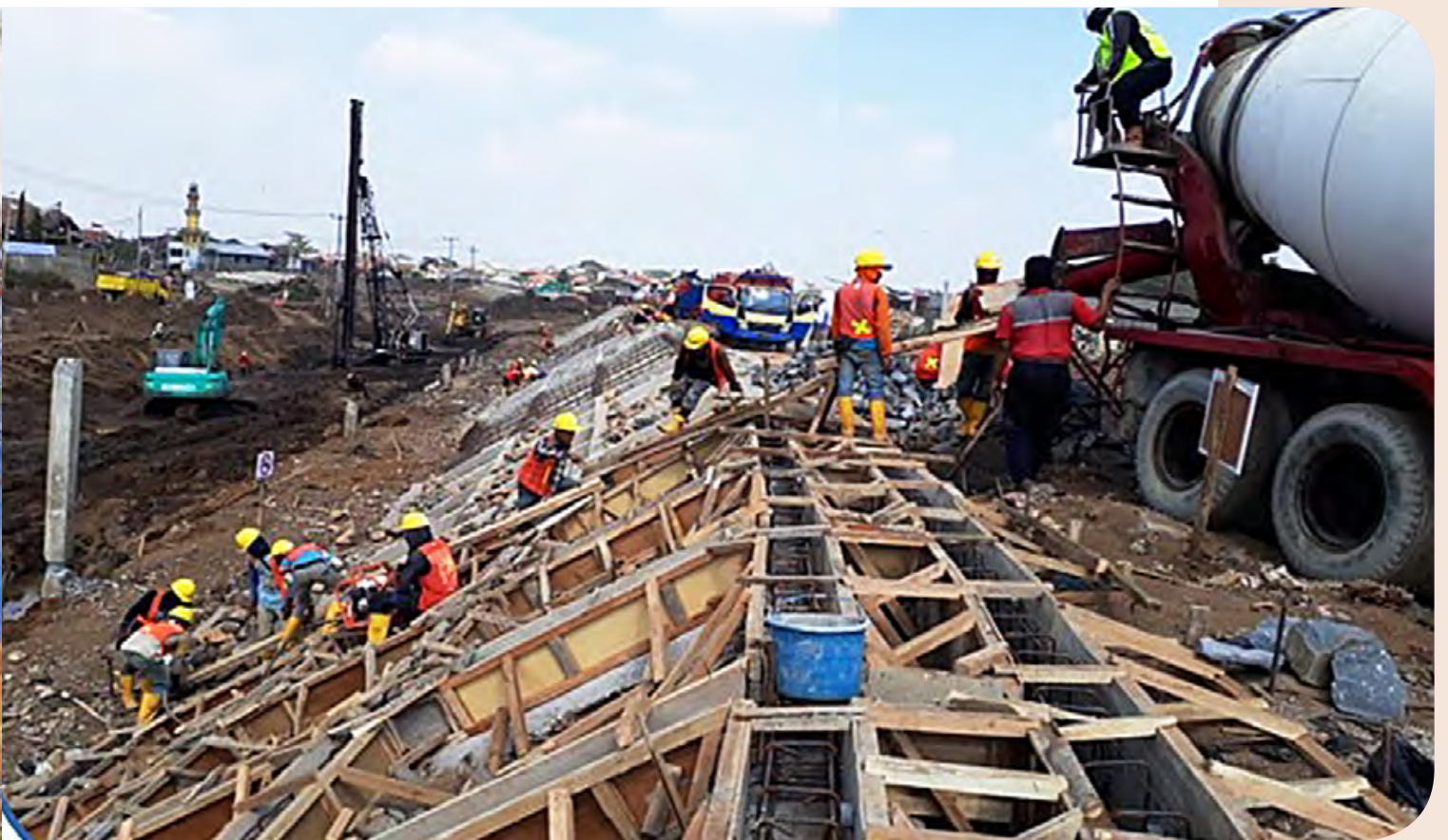
Pembangunan proyek tetap dengan protokol kesehatan

penyelenggaraan jasa konstruksi, antara lain, Pertama, membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.

“Kedua, menyediakan fasilitas pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi, Ketiga, mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari Covid-19 oleh satuan tugas,” paparnya.

la menambahkan, Keempat, mengukur suhu semua orang pada setiap pagi, siang, dan sore yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi, Kelima, membuat kerja sama penanganan *suspect* Covid-19 dengan Rumah Sakit dan Puskesmas setempat yang dilakukan penyedia jasa pekerjaan konstruksi, Keenam, menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar Covid-19 yang dilakukan oleh pengguna dan atau penyedi jasa pekerjaan, serta Ketujuh, melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana kantor dan lapangan yang dilakukan penyedia jasa dan pekerjaan konstruksi.

Lebih lanjut, la mengatakan, Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 juga menyebutkan penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar jika teridentifikasi: (i) Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran, (ii) Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), atau (iii) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala



Sumber: PUPR

Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Di lapangan dampak pandemi wabah Covid-19 sangat dirasakan para pekerja proyek bangunan. Ujang Iwan, salah satu pekerja proyek mengaku, pada awal keberadaan pandemi Covid-19 di Indonesia sempat membuat pengerjaan proyek ditunda sementara. "Proyek berhenti kami ya bingung, karena keluarga masih butuh makan dan kebutuhan lain" kata Ujang.

Tapi, Ujang mengaku, saat ini proyek sudah pada berjalan lagi, sehingga dirinya dapat kembali kerja. "Walau saat kerja tetap harus menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker, demi kesehatan bersama" akunya. (ris)

Pengalaman Bekerja di BPIW Menjadi “Guru Terbaik” Dalam Meniti Karir di Instansi Lain

Iman Argiono S.KOM, MT.

*Sub Koordinator Aplikasi dan Basis Data,
Pusat data dan Sistem Informasi Kemenparekraf*

Seringkali kita mendengar ungkapan “pengalaman adalah guru terbaik”. Ungkapan itu mengandung pengertian peristiwa yang terjadi pada perjalanan hidup seseorang dijadikan pelajaran, peringatan, dan motivasi berharga dalam menentukan langkah dari perjalanan hidup berikutnya.



Hal itu juga dirasakan Iman Argiono S.KOM, MT. Lelaki kelahiran Jakarta, 11 Oktober 1985 itu merasa, pengalaman bekerja di BPIW menjadi “guru terbaik” dalam meniti karir di instansi lain. Iman

pernah bekerja di BPIW dari sejak 2015 hingga 2017. Pada saat di BPIW ia pernah menjabat sebagai Asisten Perencanaan/Pemrograman dan Pelaksana.

Selain itu juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Selama dua tahun di BPIW Iman merasakan banyak pengalaman yang ia dapatkan. Salah satunya adalah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun, jauh di lubuk hatinya, Iman ingin bekerja di tempat yang sesuai dengan pendidikannya yakni

dunia teknologi informasi. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Berawal dari informasi dari seorang rekan, harapannya bekerja di bidang itu, terwujud. Ia diterima bekerja di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), pada 2017, sebagai Pelaksana Direktorat Fasilitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kemudian ditugaskan menjadi Kasubbag TU Direktorat Fasilitas Infrastruktur TIK, Deputi Infrastruktur.

“Saya mengajukan lamaran ke Bekraf dan diterima. Kemudian badan tersebut mengirim surat ke Sekretaris BPIW yang waktu itu dijabat Bapak Dadang Rukmana dan beliau tidak berkeberatan, karena pendidikan saya cocok dengan yang ada di Bekraf. Prosesnya kepindahannya cepat, dan akhirnya saya pindah ke sana,” ujarnya saat dbincangi “Buletin Sinergi” beberapa waktu yang lalu.

Saat pindah ke Bekraf, Iman tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, baik dari segi pergaulan dengan para pegawai maupun dengan pekerjaan yang baru. Saat Bekraf dilebur dengan Kementerian Pariwisata dan menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), lelaki berpostur tinggi besar itu pun secara otomatis bergabung dengan kementerian tersebut. Di kementerian yang dipimpin Menteri Wishnutama Kusubandio ini, Iman kini menjabat sebagai Subkoordinator Pengelolaan Aplikasi dan Basis Data.

Sama seperti saat pindah dari BPIW ke Bekraf, Iman juga telah terbiasa dengan tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaannya.

“Saya terbiasa dengan lingkungan dari pokja lelang, sampai mengurus keuangan. Di Bekraf dan Kemenparekraf saya dipercaya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” jelasnya.

Meski sudah bekerja di kementerian lain, namun statusnya masih tetap sebagai pegawai BPIW. Akan tetapi, status yang sudah bertahan dari sejak 2015 itu, akan berakhir tahun depan, karena ia lebih memilih untuk menjadi pegawai Kemenparekraf. Sebenarnya Iman ingin tetap di Kementerian PUPR, namun karena sudah merasa cocok bekerja di bidang teknologi informasi, ia memilih tetap bekerja di Kemenparekraf.

“Saya ingin secepatnya diproses, karena saya tidak mau memberatkan teman-teman BPIW, karena mereka selama ini direpotkan mengurus gaji dan kepegawaian saya. Semestinya saya sudah dari dulu mengurus status kepegawaian ini. tapi dikarenakan kesibukan pekerjaan, saya baru akan mengurusnya di awal tahun depan. Dokumennya sudah lengkap,” tuturnya.

Dari sisi pekerjaan, ia menilai baik Kementerian PUPR terutama BPIW maupun Bekraf dan Kemenparekraf sama enakannya, karena aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian/Lembaga tidak berbeda. Namun di Bekraf ia menilai pekerjaannya condong ke pelayanan kepada masyarakat sementara Di BPIW lebih condong pada pelayanan pada pimpinan seperti halnya, penyiapan kebutuhan akan data dan kajian yang dibutuhkan pimpinan. Sedangkan pekerjaan di Kemenparekraf lebih diarahkan pada layanan teknis Pengelolaan Aplikasi dan Basis Data.

Meski akan melepaskan status kepegawaiannya di Kementerian PUPR khususnya BPIW, namun baginya ikatan emosional dengan Kementerian PUPR ini tidak akan hilang. Apalagi ia sudah cukup lama bergabung dengan Kementerian PUPR (dulunya Kementerian PU) yakni sejak 2008, sebagai Staf Pusat Kajian Strategis di Setjen.

“Tentunya yang bikin kangen dengan BPIW itu teman-teman lama di sana, ada ikatan emosional, karena saya “lahir” sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan besar di sana,”



tegas Iman. Namun, ada satu hal yang ia sesali saat bekerja di BPIW, yakni beberapa kali ia mengeluh, misalnya, saat ia diharuskan lembur atau jumlah pekerjaan terbilang banyak, yang disebabkan kepadanya. Perlahan tapi pasti, sifat negatif itu ia singkirkan jauh-jauh. Kini Iman memahami bahwa setiap tugas yang diberikan kepadanya dapat menjadi bekal pada penempatan di masa yang akan datang, meski harus bekerja keras untuk menyelesaikannya.

“Bila suatu pekerjaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, saya yakin akan berguna di masa datang. Misalnya dengan bekal pengalaman sebagai satker di BPIW, saya bisa menjadi PPK di Bekraf dan Kemenparekraf,” ungkap Iman. Dengan bekal pengalaman itulah, Iman memberi masukan kepada generasi muda BPIW untuk tetap konsisten dan sungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan, karena pekerjaan tersebut, pasti akan menjadi bekal di masa datang. **(Hendra Djamal)**



BIDIK LENSA

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu dalam pengembangan suatu kawasan dan wilayah di Tanah Air. Program yang disiapkan antara lain pembangunan jalan nasional, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus serta pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman.

TOL SUMATERA

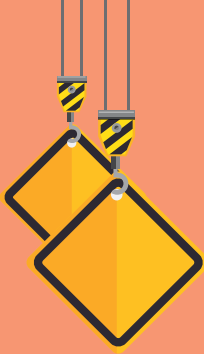
Pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera dilakukan dari Provinsi Lampung hingga Aceh sepanjang 2.987 Km. Saat ini sepanjang 648 km ruas tol sudah beroperasi. Jalan Tol Sumatera sepanjang 2.987 km merupakan koridor utama untuk meningkatkan konektivitas antara kota/kawasan di Pulau Sumatera, sehingga dapat memicu pengembangan wilayah di Sumatera.



AKSES PELABUHAN

Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2 Km sudah tuntas. Keberadaan Pelabuhan Patimban yang didukung akses jalan pantai utara (Pantura) Pulau Jawa tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek, sekaligus memperlancar arus logistik nasional. Keberadaan jalan akses tersebut juga diharapkan berpadak pada pengembangan wilayah di sekitarnya.





DUKUNG KSPN

Pembangunan jaringan jalan untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur terus dilakukan. Hal ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian Indonesia dengan menarik investasi baru, menambah lapangan kerja, serta meningkatkan jumlah wisatawan. Termasuk, mendorong pengembangan wilayah di sekitar KSPN Borobudur.



PEMBANGUNAN JEMBATAN

Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 Km yang menghubungkan kawasan Pelabuhan Kota Lama dengan Pulau Bungkutoko di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diresmikan Kamis (22/11/2020). Keberadaan jembatan ini diharapkan konektivitas dan pergerakan manusia dan barang menjadi semakin efisien, sehingga daya saing Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari meningkat dengan tumbuhnya usaha-usaha baru serta pengembangan wilayah di sekitarnya.



BPIW dan Badan Geologi Sepakat Pererat Kerja Sama

BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur memanfaatkan data dan informasi geologi. Dukungan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah.

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono saat melakukan pertemuan dengan jajaran Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Bandung, Kamis, (3/9). Pertemuan tersebut dihadiri juga jajaran pejabat kedua lembaga.

Hadi Suchayono mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur di kawasan strategis dipercepat dalam rangka pengembangan wilayah dan pemulihan ekonomi. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut, tentu perlu kajian mendalam termasuk diantaranya menganalisa daya dukung lingkungan.



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI mengenai pembahasan rencana kerja dan anggaran masing-masing Unit Eselon I Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Komisi V, Selasa, 8 September 2020. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae tersebut, dari Kementerian PUPR dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Suchayono, Inspektur Jenderal PUPR Widiarto dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sugiyartanto.

Kepala BPIW Hadi Suchayono menyatakan setiap usulan Komisi V akan diakomodir dan ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan. "Tentunya kita tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kita. Kita akan cek kondisi di lapangan seperti kondisi lahan dan kita rancang program yang akan kita laksanakan," tegasnya. (Hen)

BPIW Siap Menindaklanjuti Masukan DPR

September

Oktober

BPIW
Kementerian PUPR
memprediksi total penyerapan
keuangan Kementerian PUPR pada
2020 sebesar 97,58% dari keseluruhan pagu
Rp 85,70 Triliun. Adapun perkiraan sisa anggaran
yang tidak akan terserap terdiri dari belanja pegawai,
sisa loan, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan
Infrastruktur Wilayah I, BPIW Kementerian PUPR, Tris
Raditian saat mewakili Kepala BPIW Kementerian PUPR,
Hadi Suchayono memaparkan Realisasi Pelaksanaan
Pembangunan Infrastruktur PUPR 2020 dalam Rapat
Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
yang digelar Bappenas di Bogor, Selasa (22/9).

Tris juga mengungkapkan, realisasi anggaran
Kementerian PUPR hingga 21 September
2020 mencapai 54,29% untuk progress
keuangan dan 54,42% untuk
progres fisik.

**Tahun 2020,
Penyerapan
Kementerian
PUPR Diprediksi
97,58%**

Kementerian PUPR
melalui BPIW berkomitmen
untuk meningkatkan produktivitas
wilayah dan perlindungan lingkungan hidup
melalui dukungan infrastruktur berkelanjutan.
Salah satunya perencanaan dan implementasi
infrastruktur hijau dengan kemitraan yang luas.

Kepala BPIW, Hadi Suchayono mengatakan, perencanaan
pengembangan infrastruktur hijau perlu disesuaikan
dengan kondisi alam, artinya keberadaan infrastruktur tidak
merusak ekosistem yang ada, melainkan mengakomodir
kepentingan habitat yang ada.

"Pembangunan infrastruktur tetap mendukung pelestarian,
konservasi, dan menjaga biodiversitas atau ekosistem
dari kondisi setempat," ujar Hadi dalam Rapat Kerja
Terbatas (Rakertas) Harmonisasi Rencana Tata
Ruang dengan Wilayah Kehutanan Dalam Rangka
Percepatan Pembangunan Nasional yang
dilakukan secara virtual di Jakarta,
(13/10).(BiI)

**BPIW
Dukung
Harmonisasi
Pembangunan
Infrastruktur
Hijau**



Camping

Batu Tapak Cidahu

Liburan Seru ala *Glam Camping* Batu Tapak Cidahu

Isu ketahanan pangan saat ini menjadi fokus yang sangat penting bagi dunia. Bahkan masalah pangan telah menjadi tujuan SDGs yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi faktual bahwa saat ini penduduk dunia makin bertambah dan kebutuhan pangan pun turut mengiringinya secara eksponensial. Di Indonesia saja, pertumbuhan penduduk per tahunnya tercatat kurang lebih 3 juta jiwa, sehingga pada tahun 2020 ini diperkirakan penduduk Indonesia telah mencapai 270 juta jiwa.



TRANSPORTASI

Menggunakan Mobil

Jakarta - Sukabumi

2,5 Jam

↳ Kementerian PUPR sudah membangun jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) dan Bocimi (Bogor-Ciamis-Sukabumi) kita bisa langsung menuju ke lokasi Batu Tapak.

Menggunakan Kendaraan Umum (Bus)

↳ Naik **Bus jurusan Sukabumi**. Kemudian dari terminal Sukabumi, **naik angkutan kota** untuk menuju ke **Cidahu**. Dari Cidahu bisa **naik angkutan lagi ke Batu Tapak Camping Groundnya**.

Menggunakan Kendaraan Umum (Kereta)

↳ Naik kereta api (**commuter line**) dari Jakarta dan sekitarnya dapat **menuju stasiun Bogor**, lalu **ganti kereta dengan jurusan Sukabumi** dan **turun di stasiun Cicurug**, dilanjutkan dengan **naik angkutan menuju Cidahu**. Dari Cidahu bisa **naik angkutan lagi Camping Ground ke Batu Tapak** atau **obyek Wisata Alam Pegunungan Taman Nasional Gunung Halimun Salak**.



AKOMODASI

★ **Paket Tenda VIP**
Harga **Rp 500.000 - Rp 900.000**
dengan semua fasilitas lengkap

★ **Paket Tenda Dome Cemara**
Harga **Rp 400.000**



AKTIVITAS WISATA

Treking Hutan



Jalan setapak dikelilingi hutan dan pegunungan bawah menuju beberapa air terjun dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, menjadi pengalaman petualangan ketika berkemah, rute nya meliputi **jalan setapak tanah, hutan alam campuran dan hutan monokultur** dengan tegakannya adalah damar (agathis SP) atau pinus merkusi.

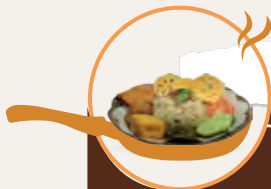
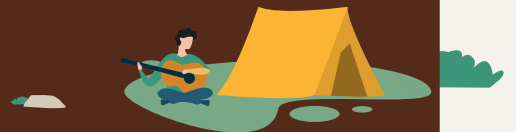


Wisata Air Terjun

Disekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak kawasan Wisata Alam Cangkung terdapat **Curug Cidahu** yang populer dengan sebutan Curug Cangkung dan Curug Empat (4). Wisata air terjun ini, diluar areal perkemahan Batu Tapak, namun merupakan **obyek daya tarik wisata alam yang kerap dikunjungi oleh para pekemping** ketika berkemah di Camping Ground Batu Tapak.

Batu Tapak Camping Ground

Tempat ini adalah areal untuk melakukan aktivitas berbasis adventure learning base, beragam kegiatan petualangan dengan nuansa berkemah memiliki keseruannya tersendiri, aktivitas bermain diketinggian (Highropes) seperti flying fox, two line bridge, net Bridge, wooden Bridge, V-Bridge dapat dilakukan oleh orang dewasa dan sebagian anak-anak. Aktivitas luar ruang lainnya adalah outbond, paint ball dan beragam kegiatan lainnya.



KULINER

Nasi Tutug Oncom

Bubur Bunut

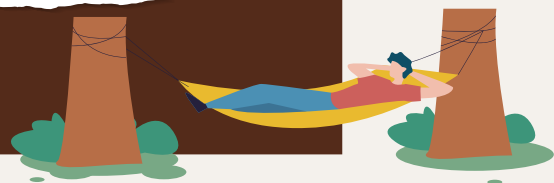
Geco, Tauge Tauco

Makanan khas Sukabumi di Restaurant Batu Tapak Sukabumi



TIPS MENUJU BATU TAPAK CAMPING GROUND

- Tetap Jaga Protokol Kesehatan di masa pandemi
- Membawa **Hand Sanitizer**
- Membawa Baju Hangat
- Membawa alat mandi lengkap





SURAT PEMBACA

Surat Pembaca_1



Bila Sedang Merapikan Jalan, Kementerian PUPR Perlu Berkoordinasi dengan Pihak Lain

Bila Kementerian PUPR sedang membangun atau sedang merapikan jalan nasional, perlu dikoordinasikan dengan pihak lain. Hal ini untuk mengetahui, apakah ada pipa gas atau fiber optik atau tidak di dalam tanah. Masalah ini penting, sebab, pipa gas atau fiber optik sering rusak.

**Ruben
Jakarta**

Surat Pembaca_2



Sudah ada Kesadara Menggunakan Aspal Buton

Sebuah isu usang yang sederhana, kenapa aspal Buton terkenal baik di dunia, tapi jalan-jalan di Indonesia gampang rontok?, Kementerian PUPR lebih baik membereskan kondisi ini dulu. Tahun 2003 aspal tersebut sudah diekspor ke Negara Cina, sehingga menambah devisa negara. Namun akan lebih baik bila aspal Buton ini digunakan di negeri sendiri.

Apalagi sekarang lagi gencar semboyan "jadilah tuan rumah di negeri sendiri". Oleh karena itu, seharusnya kita memaksimalkan aspal ini untuk negara kita sendiri. Informasi terbaru menyebutkan bahwa pada mulai September 2020, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mewajibkan penggunaan aspal Buton di Indonesia. Di tahun ini, aspal Buton sudah diuji coba di Kulonprogo. Alhamdulillah sudah ada kesadarannya.

**Libie
Palembang**

9 Cara Tingkatkan KEKEBALAN TUBUH

Salah satu cara untuk menghalau Covid-19 adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh dengan langkah-langkah berikut ini:



1
Mengonsumsi makanan bergizi yang mengandung antioksidan tinggi



2
Perbanyak minum air putih



3
Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin



4
Mengonsumsi vitamin C untuk memproduksi antibodi



5
Tidak merokok agar kesehatan paru-paru terjaga



6
Berpuasa agar organ-organ pencernaan beristirahat sejenak



7
Istirahat yang cukup agar tubuh mampu mengatur sistem imun dengan baik



8
Berpikir positif karena hati gembira adalah obat



9
Hindari stress dengan hanya mendengarkan informasi dari sumber yang valid



PUTUS

PENYEBARAN COVID-19



1
Bekerja dari Rumah
(Work From Home)



2
Belajar dari Rumah
(Study From Home)



3
Ibadah dari Rumah
(Worship From Home)



4
Tingkatkan Imunitas
Tubuh



5
Rajin Cuci Tangan



6
Hindari Menyentuh
Bagian Wajah secara
Langsung



7
Memakai Masker



8
Hindari Interaksi
Langsung



9
Disiplin Menjaga Jarak
(Physical Distancing)

**STAY
HOME**
STAY SAFE AND BE POSITIVE